RETRIBUSI - TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
2024

PERWAL NO 10. BD 2024/ NO. 10 Tahun 2024, 19 HLM

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR DAN
PELAYANAN KEBERSIHAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan;

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023, Perda Kota Depok No 1 Tahun 2024;
- Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum, serta pendaftaran dan pendataan hanya dilakukan untuk Wajib Retribusi yang bersifat permanen, dan wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ke kas Daerah atau melalui wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut, serta dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD, dan wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari 2024.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.
- Lampiran: 7 halaman.